

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 10

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabangan	

# Pendapatan Daerah 2022

## Diprediksi Capai Rp1,4 Triliun

SAMPIT- Pendapatan daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) di tahun 2022 diprediksi mencapai antara Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun.

Bupati Kotim H Halikinnor mengatakan, secara riil asumsi pendapa-

tan tersebut diluar perkiraan dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana alokasi umum serta perkiraan dana desa yang bersumber dari APBN.

Untuk itu sebelum peraturannya diterbitkan, menurutnya maka perkiraan anggaran pendapatan dan belanja daerah Ko-

tim tahun anggaran 2022 maka pendapatan sebesar Rp.1.472.671.934.600 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.247.214.693.000, pendapatan transfer sebesar Rp1.150.352.832.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebe-

sar Rp75.104.409.600. Kemudian untuk belanja sebesar Rp1.472.671.934.600. Perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp14.015.000.000, perkiraan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.015.000.000.

"Berkenaan asumsi

pendapatan dan belanja daerah tersebut maka perlu diinformasikan bahwa sampai saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 dan juga belum menerbitkan PP mengenai dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana alokasi umum dan dana desa yang bersumber dari APBN," ujar Wakil Bupati Kotim Irawati yang membacakan sambutan Bupati Kotim H Halikinnor, pada Rapat Paripurna di DPRD Kotim, Kamis (15/7).

Oleh karena itu, katanya maka tidak menutup kemungkinan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 akan mengalami penyesuaian kembali. Selain itu ia juga meminta agar penyusunan APBD harus menyesuaikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Namun mengenai hal

itu menurutnya harus memperhatikan beberapa prinsip dalam disiplin anggaran salah satunya pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. "Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja," ucapnya.

Dilanjutkannya penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD.

Kemudian semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.  c-may